

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK TERHADAP
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR DI UNIT PELAYANAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

TESIS

WAHJOE WIDODO

NIM : R 100030066

PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM TATA NEGARA

PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak setiap orang. Oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam kegotong-royongan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan pada pasal 23 ayat (2) sebagai dasar hukum pemungutan pajak oleh negara. Dalam pasal itu disebutkan bahwa “ Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang ” . Pengaturan yang seperti ini mempunyai arti yang sangat dalam yaitu menetapkan nasib rakyat. Betapa caranya rakyat, sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatkan hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantaraan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil dari mereka sendiri (Bohari, 1999;28). Ketentuan tersebut juga berarti bahwa semua pungutan pajak harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari rakyat, karena pajak itu menyayat daging sendiri .

Organisasi perpajakan sudah dilengkapi dengan dua fungsi utamanya, yaitu fungsi verifikasi / pemeriksaan (the audit function) dan fungsi pemungutan atau penagihan pajak (the collection function), satu hal yang dapat dipastikan bahwa kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung pada masalah-masalah teknis yang menyangkut metode pemungutan ,

teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, akan tetapi tergantung pada kemauan (willingness) wajib pajak, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Zain, 2003; 30).

Menurut Rocmat Soemitro (1992;15) ;

“Pajak harus didasarkan Undang-Undang ini dilandasi pemikiran bahwa wajib pajak menyayat daging tubuh kita sendiri. Pajak tidak memberikan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Persetujuan dari rakyat tersebut, diperoleh dari DPR yang terdiri dari wakil-wakil rakyat , yang secara langsung dipilih sendiri oleh rakyat dalam Pemilu.

Sedangkan Menurut A. Munawir (1992;3) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan berbagai hambatan, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat keadilan, bahwa pemungutan pajak harus adil;
2. Syarat yuridis, bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang;
3. Syarat ekonomis, bahwa pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian;
4. Syarat finansial, bahwa pemungutan harus efisien;
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Pada dasarnya, tidak ada satupun dari verifikasi atau metode teknis lainnya dapat diperluas sampai mencapai jumlah wajib pajak yang cukup, agar diperoleh efek langsung yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak atau menjamin tercapainya kepatuhan membayar pajak yang cukup tinggi. Prosedur teknik tersebut memang berperan dalam mengurangi penyelundupan pajak. Akan tetapi yang diharapkan adalah agar prosedur tersebut dapat membantu pembentukan akal sehat para wajib pajak yang pada akhirnya akan menghasilkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan para wajib pajak (Zain, 2003; 31) .

Korelasi birokrasi dengan masyarakat harus tercipta sinergi yang baik bukan sebaliknya. Implementasi penarikan pajak bagi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri, dalam penelitian ini akan dikupas lebih dalam.

Penelitian ” Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) : Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak - Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri ” ini akan mengangkat satu sisi perlindungan hukum bagi wajib pajak atas kesadarannya membayar pajak pada kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah dan Samsat Wonogiri.

1.2 Perumusan Permasalahan

Dalam Pelayanan Umum (Public Service) kepada wajib pajak, jelas sangat dirasakan oleh wajib pajak akibat penarikan lanjutan diluar aturan yang ada. Dari situlah perlunya perlindungan hukum terhadap wajib pajak yang berarti.

Berdasarkan pandangan tersebut, maka penulis mengajukan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap wajib pajak dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah di Kabupaten Wonogiri.
2. Bagaimana tingkat kepuasan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri terhadap pelayanan para petugas.
3. Apa yang menjadi kendala bagi wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan sebagaimana dipaparkan di atas, penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap wajib pajak dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah di Kabupaten Wonogiri;
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri terhadap pelayanan para petugas;

3. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala bagi wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri.

1.4 Manfaat atau Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Dari segi teori, hasil penelitian dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perlindungan bagi wajib pajak;
2. Dari segi praktis, hasil penelitian dapat memberikan masukan-masukan kepada Dinas Pendapatan Daerah Wonogiri dalam menentukan mekanisme layanan yang diinginkan para wajib pajak;
3. Dapat meningkatkan pengetahuan para wajib pajak tentang pemberian perlindungan hukum kepada para wajib pajak.

1.5 Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara non doktrinal dan penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang meneliti dan menelaah bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yang disebut penelitian kepustakaan. Selanjutnya untuk menunjang dan melengkapi fakta yang ada, maka dilakukan pula penelitian lapangan. Penelitian non doktrinal yang dimaksud adalah penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Tipologi penelitian ini sering disebut sebagai Socio Legal Research (Sunggono, 1996;43) Sasaran dalam penelitian hukum ini ada dua, yaitu norm untuk

penelitian kepustakaan dan perilaku untuk penelitian lapangan (Mertokusumo, 2001 ; 30-31). Metode sampling yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan nonprobability sampling (metode tidak acak). Adapun jenis prosedur pengambilan sampling yang digunakan adalah menggunakan purposive sampling atau sampling dengan maksud tertentu (Sukandarrumidi, 2002;65). Dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur dalam bentuk kuisisioner.

1.6 Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini didasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder yang didukung penelitian lapangan dan menggunakan metode empiris.

Cara yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mencari kaedah atau norma dengan menggunakan metode penemuan hukum antara lain metode penafsiran dan metode argumentasi.

(1) Data, yaitu mencari data sekunder yang diperoleh dari :

a}. Bahan hukum primer

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 – tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan-peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen
- Peraturan-peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi dan berbagai perubahan atas PP No. 19. Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
- Berbagai doktrin-doktrin yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen
- Yurisprudensi

b}. Bahan hukum sekunder yaitu berbagai bahan kepustakaan (literatur), seperti buku-buku, majalah / jurnal, hasil penelitian, makalah dalam seminar, simposium, lokakarya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c}. Bahan hukum tertier, terdiri dari :

- kamus hukum (BLACK'S)
- kamus Bahasa Indonesia
- kamus Bahasa Inggris

(2) Alat Penelitian

Dalam penelitian kepustakaan ini alat penelitiannya adalah studi dokumen. Pertama-tama meneliti peraturan-peraturan dalam bidang hukum yang menjadi objek penelitian kemudian memilih dan menghimpunnya. Dari pengumpulan tersebut dipilih asas-asas hukum

dan kaidah-kaidah hukumnya.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang menggunakan metode empiris dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan yang bertujuan untuk memperoleh fakta mengenai perilaku dari subjek hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

(1) Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan adalah data primer, yaitu segala sesuatu yang ada kaitannya dengan perlindungan hukum bagi wajib pajak. Untuk memperoleh data primer tersebut telah ditentukan lokasi dan subjek penelitian yaitu sebagai berikut :

a}. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Wonogiri – Jawa Tengah.

b}. Subjek penelitian

1} Responden (sampel)

Pengambilan sampel dilakukan untuk tujuan melakukan reduksi jumlah objek, dapat mereduksi jumlah objek, dapat menghilangkan objek, dapat menghilangkan sifat bosan, menghindarkan kejemuhan serta kesalahan subjektif (Sukandarrumidi, 2002;52). Begitu juga masalah biaya, waktu, ketelitian dan masalah ekonomis. Penulis dalam penelitian ini mengacu kepada pendapat Baiky (1982) yang mengemukakan

bahwa untuk penelitian yang akan menggunakan analisis data dengan statistik, jumlah sampel paling sedikit adalah 30. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan responden sebagai sampel sebanyak 40 orang.

2} Nara Sumber

- Kepala Kantor Pelayanan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri
- Pegawai Layanan Pajak Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri

3} Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga (Sekaran, 2000;264). Dalam suatu penelitian, populasi yang dipilih mempunyai hubungan erat dengan masalah yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak di daerah Wonogiri yang melakukan pembayaran pajak pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri.

4} Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, di samping penggunaan metode yang tepat diperlukan juga kemampuan memilih dan bahkan juga menyusun alat pengumpul data yang relevan. Kecermatan dalam memilih dan menyusun alat pengumpul data ini sangat berpengaruh pada objektivitas hasil penelitian. Dengan kata lain pengumpul data yang tepat dalam suatu penelitian akan memungkinkan

dicapainya pemecahan masalah secara valid dan reliabel.

Teknik yang digunakan untuk mengungkap data variabel penelitian adalah kuisioner. Kuisioner (Arikunto, 1998;140) adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang di gunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan untuk memperoleh informasi tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.

Dalam pembuatan kuisioner, maka penulis terlebih dahulu menggali dari teori-teori yang ada, kemudian merumuskan faktor-faktor dan indikator-indikator dari variabel yang akan di teliti dan baru kemudian berdasarkan indikator-indikator tersebut, maka diwujudkan dalam pertanyaan-pertanyaan yang relevan. Langkah-langkah dalam pembuatan kuesioner seperti tersebut di atas di maksudkan agar dapat diperoleh validitas yang logis dari kuisioner.

(2) Alat Penelitian

Untuk mengumpulkan data pada penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara, alat yang digunakan berupa pedoman wawancara yang ditujukan kepada semua responden. Wawancara merupakan cara yang efektif untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang akan diteliti, selain untuk mencari kedalaman materi. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang secara langsung dengan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

1.7 Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dilihat kelengkapannya, kejelasannya serta keseragaman data yang diperlukan selanjutnya data tersebut diklasifikasi dan disusun secara sistematis dan konsisten agar memudahkan penulis menganalisis data yang ada, kemudian tahap selanjutnya pengolahan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dilakukan analisa deskriptif kualitatif, kemudian dibandingkan dengan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, sehingga dapat diperoleh gambaran dan kesimpulan dari permasalahan yang dibahas, berikut saran untuk pembuatan dan atau penyempurnaan produk hukum di masa yang akan datang, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

1.8 Tahapan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap, yaitu : tahap persiapan, tahap pelaksanaan penelitian dan tahap penyusunan tesis.

a. Tahap persiapan

Pada tahap ini dimulai dengan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian. Sesudah itu dikonsultasikan untuk penyempurnaannya, penyusunan instrumen penelitian dan pengurusan ijin penelitian.

b. Tahap pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu:

1. Pada penelitian kepustakaan, pertama-tama dilakukan pengumpulan data dan pengkajian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut meliputi

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

2. Pada pelaksanaan penelitian lapangan dilakukan dengan penentuan responden dan pengumpulan data. Hal ini dilakukan melalui wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.

c. Tahap penyelesaian

Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yaitu menganalisis data penelitian, dengan mengelompokkan serta menghubungkan aspek-aspek yang berkaitan, kemudian dilanjutkan dengan penulisan laporan awal serta konsultasi. Setelah itu dilakukan penyempurnaan laporan akhir.

1.9 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, sistematika penulisan yang dipaparkan digunakan untuk menggambarkan penulisan yang sistematis dan terarah. Sehingga mempermudah penelusuran permasalahan yang dikemukakan. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Mengungkapkan tentang pendahuluan yang di dalamnya membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas teori-teori perpajakan beserta landasan hukum yang dipergunakan untuk mendukung dan memperjelas pembahasan penelitian yang dikaitkan dengan teori-teori yang melatar belaknginya. Antara lain meliputi pengertian pajak, wajib pajak,

iklim perpajakan, perlindungan hukum bagi wajib pajak dari pemerintah, pengertian-pengertian sumber pendapatan daerah dan tugas Dinas Pendapatan Daerah.

BAB III DESKRIPSI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Berisi tentang sejarah terbentuknya Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah, arah kebijakan, visi, misi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah, tugas pokok dan fungsi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah, implementasi pelayanan dan mekanisme kerja pendapatan pembayaran dan penyerahan di Kabupaten Wonogiri.

BAB IV PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil analisa data dan pembahasan mekanisme hukum dan penerapannya di Indonesia dan membahas mengenai temuan yang dihasilkan serta pembahasan dalam memecahkan masalah.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Merupakan simpulan serta saran-saran dari hasil penelitian terhadap masalah yang dibahas.